

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi pembangunan di Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk mencapai cita-cita nasional dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, makmur dan menjunjung tinggi nilai religius. Realitas tersebut yang mengarahkan kebijakan pembangunan nasional pada usaha proaktif untuk meningkatkan peran segenap lapisan masyarakat agar pembangunan nasional mudah untuk mencapai tujuan yang cita-citakan.

Aktualisasi pembangunan nasional merupakan bagian dari sebuah sistem yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah system maka pembangunan nasional harus dilaksanakan mengacu pada aturan ketatanegaraan sehingga diharapkan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Secara konsepsional pencapaian tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan bertumpu pelibatan segenap komponen masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (*stakeholders*) dalam proses perencanaan pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti dengan

kegiatan aplikatif yang merupakan kontinuitas dari perencanaan pembangunan yang telah disusun. Strategi pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan aktivitas pembangunan dilandasi oleh pemikiran bahwa masyarakat merupakan komunitas yang paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat-istiadat serta kebiasaan di lingkungannya. Dengan cara seperti ini maka upaya untuk mencapai tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dapat dioptimalkan.

Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah meluncurkan berbagai program untuk mempercepat pencapaian tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Program tersebut pada umumnya memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sehingga memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai.

Salah satu bentuk program yang diluncurkan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan yaitu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat / kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Hal ini dilakukan agar program PNPM berakar dari kondisi kultur serta kebutuhan mendesak masyarakat yang ada di desa, sehingga diharapkan mampu membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Adanya tahapan kegiatan yang bersifat partisipatif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan bahwa program ini mengedepankan nilai demokratis dalam upaya pencapaian tujuannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Salah satu komponen masyarakat yang diharapkan dapat berperan dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kaum perempuan. PNPM-Perdesaan memang menekankan keikutsertaan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Bahkan wajib melibatkan kaum perempuan. Keterlibatan kaum perempuan ini diharapkan bukan hanya sebagai peserta pasif, melainkan juga aktif. Dalam PNPM-Perdesaan, perempuan memiliki hak yang sama

dengan laki-laki, hadir pada setiap pertemuan, mengeluarkan pendapat maupun terlibat sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan lain, tim pemantau dan menikmati hasilnya.

Hasil pengamatan di lapangan khususnya peran kaum perempuan melalui Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo menunjukkan bahwa sebagian perempuan belum terlibat aktif dalam kegiatan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Hal ini terjadi karena sebagian diantara kaum perempuan yang ada di desa ini belum memiliki usaha sebagai salah satu persyaratan untuk menerima dana simpan pinjam.

Kondisi lainnya menunjukkan bahwa sebagian perempuan ternyata tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal sehingga tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dari PNPM Mandiri. Ketidakmampuan tersebut dikarenakan sebagian perempuan kurang memiliki kecakapan atau keterampilan dalam mengembangkan usahanya.

Mencermati masalah ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna menganalisis tingkat peran kaum perempuan dalam program PNPM Mandiri melalui penelitian yang diformulasikan dengan judul : Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) dalam pemberdayaan perempuan melalui program SPKP di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada:” Bagaimana peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) dalam pemberdayaan perempuan melalui program SPKP di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) dalam pemberdayaan perempuan melalui program SPKP di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi untuk memperkaya khasanah Ilmu Pendidikan Luar Sekolah terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan peran kaum perempuan dalam mengaktualisasikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Bagi peneliti, pelaksanaan penelitian ini merupakan ajang untuk melatih berpikir ilmiah dalam menganalisis masalah yang berhubungan dengan peran kaum perempuan dalam mengaktualisasikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk lebih memberdayakan kaum perempuan dalam mengaktualisasikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Sebagai bahan analisis dan kajian terkait strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran kaum perempuan dalam mengaktualisasikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.